



Local Governments
for Sustainability

Target ambisius, realistiskah?

**Sudut Pandang Kota dalam
Membangun Lingkungan yang
Baik**

Oleh : Ari Mochamad
Jakarta, Indonesia



Kota: Ancaman dan Harapan

- Kontributor, yang bertransisi menjadi game changer
- 70% emisi gas rumah kaca (GRK) berasal dari aktivitas perkotaan. Kota sebagai **global hotspot** dari perubahan iklim (*UN-Habitat*)
- 50% penduduk akan bertempat tinggal di wilayah perkotaan, yang hanya menempati tiga persen dari keseluruhan tanah daratan. Bagi negara berkembang kondisi ini akan semakin mengkhawatirkan, yang bakal menjadi tempat tinggal bagi 80% persen jumlah keseluruhan penduduk dunia dalam waktu dua puluh lima tahun mendatang.
- Gambaran **perkotaan di sebagian kota besar di negara berkembang, ditandai dengan pencemaran dan polusi udara** yang sudah melebihi batas emisi dan standar Kesehatan serta **tingginya tingkat kerentanan** dampak perubahan iklim.
- **Kota adalah tempat yang dapat dikelola untuk berkontribusi dalam penurunan emisi gas rumah kaca.**
- **Inisiatif kota muncul dari kesadaran perlindungan lingkungan dan ancaman perubahan iklim saat ini dan di masa yang akan datang.**



Komitmen dan Strategi

→ *Dari kebijakan menuju Aksi*

- Janji Indonesia untuk melakukan mitigasi dan adaptasi PI, melalui Paris Agreement, lalu NDC bukanlah sebatas sikap karena kita sebagai anggota UNFCCC, namun lebih jauh daripada itu, yaitu **menjaga dan menyelamatkan target target pembangunan.**
- Indonesia telah berkomitmen untuk masuk ke dalam jalur pertumbuhan **ekonomi rendah karbon (low carbon economy) yang dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan.** Pertumbuhan ekonomi 5,6% sampai 2024 dan selanjutnya rata-rata 6% sampai 2045.
- Catatan dari Bappenas (2019) yang dituangkan dalam dokumen pembangunan rendah karbon mengatakan **‘pertumbuhan tinggi dapat terjadi dengan syarat jika aktivitas pembangunan mengintegrasikan mitigasi perubahan iklim untuk mengurangi emisi gas rumah kaca 41% pada 2030, termasuk di dalamnya adalah pemanfaatan energi terbarukan mencapai 23% bauran energi primer hingga 2030.**
- Visi Indonesia Emas 2045 (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia dan diluncurkan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo di 2019. **Indonesia (diharapkan) menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat atau kelima di dunia pada 2045.**



→ *Potret Kota/Daerah dalam Upaya Pembangunan Rendah Karbon*

Tingginya komitmen Kota:

- Isu perubahan iklim dan TPB (laporan inventarisasi GRK, kajian kerentanan dan risiko dampak perubahan iklim, rencana aksi iklim/RAD-GRK) telah disematkan ke dalam RPJMD atau proses finalisasi RPJMD periode selanjutnya. Didukung dengan Pembentukan kelompok kerja (pokja) perubahan iklim
- Secara sukarela bersama kepala daerah di seluruh dunia berkomitmen dalam GCoM
- Respon baik dalam penyediaan data & informasi

Peluang:

- Pemanfaatan energi terbarukan di semua sector. Tenaga surya dan biomassa memiliki peranan penting karena potensinya yang melimpah (Hasil pemodelan awal oleh Fraunhofer ISE menunjukkan bahwa 100% energi terbarukan di NTB).
- Pendanaan aksi iklim dari pihak ketiga dalam bentuk hibah/pinjaman.
- Keberadaan mitra pembangunan pemda di bawah program nasional/global.
- Kerjasama dan dukungan dari pihak swasta dalam operasionalisasi produksi dan rantai pasok serta pelatihan atau pendanaan.
- Beragam case study/praktik baik/module/tools baik tingkat nasional maupun global yang dapat diadopsi sesuai dengan kebutuhan oleh masing-masing pemda.
- Ragam dan pilihan instrument pendukung yang perlu dioptimalkan dan 'disempurnakan' terkait Pendanaan, Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya manusia serta pengembangan dan inovasi pengetahuan dan teknologi.



Dari Komitmen ke Perencanaan terstruktur dan Sistematis

Tantangan:

- Adanya gap pemahaman isu perubahan iklim oleh OPD dan DPRD (akibat Rotasi staff tinggi, jabatan yang terbatas 5 tahun. Dll)
- Adanya gap terkait kebutuhan peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan, teknologi dan pendanaan.
- Lemahnya koordinasi vertikal (multi level governance: Pemerintah Pusat-Provinsi & Provinsi-Kota/Kabupaten), termasuk antar Kementerian.
- Anggaran/APBD yang terbatas (vs Inovasi Pendanaan).
- Sulit melakukan monev untuk melacak anggaran dan status kegiatan yang direncanakan
- Lemahnya respon/tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diusulkan oleh pemda
- Proses birokrasi yang kompleks dalam hal meminta dukungan kepada Pemerintah Pusat untuk pengajuan hibah/pinjaman dari pihak ketiga
- Belum tersedianya juklak & juknis terhadap kebijakan/peraturan baru dari Pemerintah Pusat
- Belum adanya dukungan penuh Pemerintah Pusat (K/L) dalam akses data & informasi tingkat nasional (seperti: listrik, BBM, dan sebagainya) kepada instansi terkait (misalnya: Pertamina, PLN, PGN, dan sebagainya).

